

PESINDO ACEH 1945-1952: ORGANISASI NASIONAL DI TINGKAT LOKAL

PESINDO ACEH 1945-1952: NATIONAL ORGANIZATION IN LOCAL AREA

Sudirman

Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh
Jln. Tuanku Hasyim Banta Muda No. 17 Banda Aceh
e-mail: dirmanaceh@ymail.com

Naskah Diterima: 2 Januari 2014

Naskah Direvisi: 11 Februari 2014

Naskah Disetujui: 18 Februari 2014

Abstrak

Penelitian berjudul “Pesindo Aceh 1945-1952: Organisasi Nasional di Tingkat Lokal” membahas Pesindo Aceh. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan mengapa muncul Pesindo di Aceh sehingga menjadi kekuatan politik dan peranannya dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk pengumpulan data digunakan metode sejarah. Penggunaan metode sejarah dimaksudkan supaya mendapatkan data yang akurat. Melalui metode sejarah dilakukan studi secara mendalam sehingga diperoleh pemahaman yang menyeluruh dan akurat tentang Pesindo. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial-politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya tarik elit Aceh bergabung ke dalam Pesindo karena asas kedaulatan rakyat yang ditawarkannya. Masyarakat bergabung ke dalam Pesindo yang sosialisme bukan berarti fundamen orientasi politik elit Aceh yang terikat kepada nilai atau simbol suku, kekerabatan, dan agama menjadi hilang. Kekhawatiran bahwa PKI (Partai Komunis Indonesia) akan mengambil alih Pesindo sebagai wadah organisasinya di Aceh merupakan bagian dari alasan diterimanya Pesindo di Aceh. Pesindo berperan aktif dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, terutama pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia.

Kata kunci: Pesindo Aceh, organisasi nasional, politik.

Abstract

The research entitles “Pesindo Aceh 1945-1952: Organisasi Nasional di Tingkat Aceh” discussed Pesindo Aceh. The purpose of the research is to explain the reason of Pesindo existences in Aceh that become one of the political powers and role in defending Indonesia Republic independence. In collecting the data this research uses historical method in getting the accuracy of the data. Through this method, we can gain the comprehensive and understanding, also accurate data about Pesindo. The technique of collecting the data is through an in depth interview and library research. This research also uses the socio-politics approach. The result of the research found that tractive power of Aceh politicians which joined with Pesindo because they offer the principle of society sovereignty in Aceh. The society merge with Pesindo which has the socialism principle is not because the Aceh elite politicians have bounding orientations in tribe, kinship, and religions will vanish, but the main purpose is worried of PKI (Indonesia Communist Party) will take over Pesindo as an Political Organizations in Aceh. Pesindo have a great role in defending the Indonesian independence, especially in the era of revolutions.

Keywords: *Pesindo Aceh, national organization, politics.*

A. PENDAHULUAN

Derap langkah pergerakan nasional yang pada mulanya muncul di pulau Jawa sejak berdiri SI, SDI, dan Boedi Oetomo, dalam waktu yang relatif singkat bergema pula di Aceh. Organisasi-organisasi yang didirikan di Aceh pada umumnya dijadikan sebagai wadah kegiatan politik. Melalui organisasi (sekali pun bukan partai politik) rakyat Aceh menyalurkan aspirasi politiknya. Masyarakat Aceh menyalurkan keinginan politiknya dengan cara lebih menonjolkan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Tidak hanya demikian, bahkan seperti yang disebutkan oleh Piekaar, sekolah-sekolah menengah agama pun dijadikan sebagai sarana propaganda antipenjajahan (Piekaar, 1998: 24).

Dalam karya monumentalnya, *Aceh dan Peperangan dengan Jepang*, A.J. Piekaar (Piekaar, 1998: 24) secara tegas menyatakan bahwa menjelang peperangan Asia Timur Raya, perpolitikan orang Aceh bercorak keagamaan dan tipikal Aceh. Sementara aliran politik nasional yang modern hampir tidak berpengaruh pada rakyat Aceh, walaupun ada terbatas pada anggota perorangan. Akan tetapi, beberapa tahun kemudian kenyataan menjadi lain, Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) yang dibentuk di Aceh pada 20 Desember 1945 (Hasjmy, 1985: 236), muncul sebagai kekuatan politik yang tangguh (*den grootste republikenische organisatie*) di Aceh.

William Liddle menyebutkan bahwa unsur kekerabatan, agama, marga, dan suku bangsa selalu mengungkapkan diri dalam perpolitikan pada masyarakat tradisional yang bersangkutan. Kajian-kajian tentang kondisi sosial yang mendahului letusan kekerasan biasanya memberikan tekanan kepada keluhan-keluhan dari sebuah kelompok tertindas menentang apa yang mereka persepsikan sebagai "pengorbanan". Kekerasan kelompok, menurut Jerri D. Rose, dipicu oleh tindakan-tindakan provokasi yang melambungkan potensi keluhan yang lama dalam masyarakat (Jerri, 1974: 193).

Perubahan yang begitu cepat terhadap orientasi politik bagi suatu masyarakat tradisional seperti yang terjadi di Aceh menarik untuk diketahui. Selain itu, penelitian sejarah lokal seperti ini perlu dilakukan sebagai bahan bacaan bagi masyarakat agar menambah wawasan tentang khasanah budaya bangsa Indonesia. Sejarah lokal juga seharusnya dijadikan sebagai bahan bacaan atau sebagai muatan lokal dalam kurikulum sekolah. Demikian pula pembuatan film dokumenter tentang perjalanan sejarah bangsa perlu dilakukan untuk membangkitkan semangat nasionalisme masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penelitian tentang Pesindo penting dan menarik dilakukan dalam penelitian yang berjudul "Pesindo Aceh 1945-1952: Organisasi Nasional di Tingkat Lokal".

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Mengapa di Aceh berdiri Pesindo? Apa kiprah dan peranan Pesindo Aceh dalam mempertahankan Kemerdekaan RI di Aceh? Dengan demikian, kajian ini dapat memberikan gambaran perilaku kelompok pergerakan di Aceh dan sekaligus sebagai bahan komparatif terhadap studi organisasi yang sama dan sezaman di daerah lain.

Tujuan penelitian ini, *pertama*, menjelaskan mengapa di Aceh berdiri Pesindo. *Kedua*, mendeskripsikan kiprah dan peranan Pesindo Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan RI di Aceh.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut. Secara teoretis dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap model penelitian dan penulisan sejarah lokal. Kegunaan secara praktis, yaitu sebagai masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan dan sebagai bahan bacaan masyarakat untuk memperluas wawasan terhadap bangsa dan negaranya.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis (Gilbert J. Garraghan dalam Abdurrahman, 2007: 53).

Pengumpulan sumber dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka dilakukan di perpustakaan, seperti Perpustakaan Museum Aceh, Badan Perpustakaan dan Arsip Pemerintah Aceh, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, Perpustakaan Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh, Perpustakaan Museum Ali Hasjmy, dan buku-buku koleksi penulis. Teknik wawancara digunakan karena ingin mendapatkan keterangan yang lebih mendalam tentang Pesindo. Oleh karena itu, informan yang dipilih adalah orang yang menguasai dan memahami sumber dan informasi tentang Pesindo. Untuk itu, informan yang digunakan terdiri atas sejarawan atau tokoh sejarah dan pelaku sejarah.

Sumber yang sudah dikumpulkan diverifikasi. Verifikasi sumber terdiri atas kritik interen untuk membuktikan bahwa sumber dapat dipercaya dan kritik eksteren yang digunakan untuk menguji keaslian sumber (Pranoto, 2010: 36-37). Kritik sumber dilakukan dengan membandingkan dari berbagai sumber dan *cross-check* dengan informan. Setelah sumber-sumber tentang Pesindo dianggap akurat, lalu diinterpretasi yang berupa analisis (menguraikan sumber) dan sintesis, yaitu menyatukan berbagai interpretasi terhadap sumber (Kuntowijoyo, 2005: 102-103). Analisis dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan dan teori. Setelah data-data diinterpretasi lalu ditulis secara sistematis dan kronologis.

C. HASIL DAN BAHASAN

1. Proses Lahirnya Pesindo Aceh

Lahirnya Pesindo di tengah masyarakat Aceh yang religius tidak dapat

dipisahkan dari kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Aceh. Hal itu disebabkan telah mengalami proses tradisional sebagai akibat pembangunan ekonomi dan kolonisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Akibatnya, munculnya pusat-pusat pertumbuhan kota, perkebunan, dan pertambangan yang berorientasi pada pasar dunia. Demikian pula produk ekspor Aceh berubah dari komoditas pinang dan lada menjadi komoditas minyak tanah, karet, kelapa sawit, teh, dan terpenin (*Volksteeling*, 1934: 20,22,116, dan 123).

Minoritas pendatang yang mendiami pusat-pusat pertumbuhan berorientasi ke luar "dunia Aceh". Masalahnya, kebijakan pemerintah kolonial yang bersifat segregatif dalam bidang hukum, administrasi pemerintahan, dan pendidikan menimbulkan kerenggangan sosial antara pribumi Aceh dengan minoritas pendatang. Oleh karena itu, dapat dimengerti apabila mereka bukan saja mengelompok dalam perkumpulan yang eksklusif suku dan profesi, tetapi juga cukup cepat menyerap organisasi yang berasas kebangsaan atau pembaharuan, seperti organisasi Parindra, Taman Siswa, dan Muhammadiyah.

Dalam berhadapan dengan rakyat Aceh, Pemerintah Hindia Belanda bersandar kepada elit tradisional (hulubalang) yang sudah terbentuk sejak masa kesultanan Aceh. Dengan kewenangan hukum dan keamanan, mereka memiliki kekuasaan yang absolut di daerah yurisdikinya. Dengan posisi sosial ekonominya, hulubalang mengontrol sebagian besar alat produksi di pedesaan, yaitu sawah, tebat, kebun, dan ternak. Akibatnya, timbul kesenjangan sosial antara hulubalang dengan rakyatnya (Hamka, 1966: 96).

Dalam kehidupan orang Aceh sebagai pemeluk agama Islam, ulama memperoleh kedudukan terhormat dalam masyarakat melalui intervensinya pada berbagai upacara, seperti daur hidup, pertanian, dan agama. Dari tingkat keilmuan, mereka terdiri atas ulama yang

memimpin pesantren (*dayah*), imam mesjid, dan imam *meunasah*. Dalam praktik keagamaan, mereka bersikap akomodatif terhadap tradisi lokal selama menurut tidak bertentangan dengan ajaran Islam (Sulaiman, 1994: 66, 84).

Munculnya lembaga-lembaga modern, telah melahirkan pula elit tandingan dalam masyarakat Aceh, yaitu ulama pembaharuan yang berbasis pada madrasah-madrasah dan intelegensia muda yang terdiri atas guru, pengacara, dan jurnalis atau sastrawan. Mereka adalah kelompok sosial yang begitu peka terhadap nilai-nilai baru yang berasal dari luar dan sekaligus bersikap kritis terhadap keterbelakangan dan ketidakadilan yang terdapat dalam masyarakatnya.

Hubungan sosial antara elit tandingan dengan hulubalang dan ulama tradisional menjelang Perang Asia Timur Raya telah berlangsung dalam suasana konfliktual. Masalahnya, mereka menggugat adat dalam masyarakat Aceh yang menurut pandangan mereka menimbulkan ketidakadilan dan keterbelakangan. Dalam pola interaksi yang demikian dapat dipahami apabila elit tandingan begitu antusias menyambut kedatangan Jepang. Pemerintah Militer Jepang segera merekrut mereka dalam berbagai administrasi sembari memberikan konsesi politik terhadap Islam (Sulaiman, 1994: 66, 84).

Uleebalang merupakan kelompok yang dirugikan oleh kebijakan militer Jepang. Kekuasaan kepolisian dan kehakiman yang selama ini mereka nikmati dibatasi oleh Pemerintah Militer Jepang sehingga tugas mereka terbatas pada urusan kepamongprajaan. Hal demikian dengan sendirinya berdampak pula terhadap ekonomi mereka. Dengan politik keseimbangan yang dilaksanakan oleh Jepang, suasana politik di antara elit bersaing justru bertambah tinggi selama pendudukan Jepang.

Kapitulasi Jepang dan kedatangan Sekutu yang di dalamnya terdapat Belanda, seperti di Medan dan Sabang begitu

menggusarkan elit Aceh. Hal itu disebabkan mereka telah begitu jauh bekerjasama dengan Pemerintah Jepang.

Mengamati suasana politik yang konfliktual, atas prakarsa Hasballah Daud, pegawai *Tiho Hoin* dan alumni HIK Muhammadiyah Yogyakarta, diselenggarakan rapat di Lampaseh, Kutaraja (kini Banda Aceh) pada 4-5 Oktober 1945. Dalam rapat tersebut diputuskan untuk mendirikan IPI (Ikatan Pemuda Indonesia). Sebagai ketua IPI dipilih Ali Hasjmy, redaktur *Atjeh Simbun* (Ghazaly, 1978: 18).

Dalam rapat pertama tersebut ditetapkan pula pengurus organisasi, sebagai berikut. Ketua I: Ali Hasjmy. Ketua II: Teuku Manyak Arif. Setia Usaha I: Usman. Setia Usaha II: Anwar Manyak. Bendahara: Zaini Bakry. Pembantu-pembantu: Muhammad Saleh Rahmany, Muhammad, Muhammad Aziz, Tuwanku Abdulwahab, M. Yunat, Tuwanku Hasyim, Ghazali Yunus, Murdani, Teungku Idris, Asman, Potan Harahap, Mukhtar Lubis, Said Ali, Said Ahmad Dahlan, dan Haji Jamin. Selanjutnya, Dewan Pengurus IPI juga dilengkapi dengan staf komisar. Mereka adalah Tuanku Adris, Asman, Potan Harahap, Mukhtar Lubis, Said Ahmad Dahlan, dan M. Jamin (Ali *et al.*, 1983: 217).

Keesokan harinya, mereka menghadap T. Nyak Arif (Residen Aceh) untuk menyampaikan hasil rapat (Hasjim, 1946: 2). Tidak diketahui secara detail pembicaraan di antara mereka. Suatu hal yang jelas bahwa setelah pertemuan, keanggotaan pengurus diperluas sehingga mewakili kelompok-kelompok sosial yang ada di Kutaraja (Hasjim, 1947: 2).

Upaya konsolidasi terus mereka lakukan terhadap organisasi yang baru dibentuk. Dua hari kemudian mereka melakukan rapat pimpinan di kantor Twk. Abdul Aziz, mantan ketua *Maibkatra*, guna menyusun kembali pengurus baru. Walaupun ketuanya masih tetap dijabat oleh Ali Hasjmy, tetapi anggota pengurus bertambah jumlahnya. Sementara beberapa

di antara anggotanya mengalami perubahan posisi (Sulaiman, 1997: 119).

a. Konferensi Pesindo I

Pada 5-6 Oktober 1945, IPI mengadakan Konferensi I yang bertempat di Kutaraja. Konferensi tersebut dihadiri oleh wakil-wakil cabang IPI seluruh Aceh. Satu di antara permasalahan yang berkembang dalam konferensi tersebut, yaitu IPI sebagai nama organisasi perjuangan pemuda, tidak sesuai dan kurang memberikan gambaran terhadap perjuangan yang bersifat dinamis dan revolusioner (Hasjmy, 1985: 231).

Dalam suatu rapat yang diadakan pada sore hari 6 Oktober 1945, para pemimpin IPI membubarkan organisasi tersebut. Sebagai gantinya, dibentuk BPI (Barisan Pemuda Indonesia). Ketua organisasi ini masih tetap dijabat oleh Ali Hasjmy, sedangkan Tuanku Hasjim diangkat sebagai sekretaris (Hasjim, 1964: 5). Pergantian nama IPI menjadi BPI merupakan usaha kelompok pemuda untuk memberikan cap militer dan warna revolusioner terhadap organisasi. Kata "barisan" yang ada dalam singkatan BPI mengungkapkan sifat kemiliteran organisasi (Wawancara dengan Mahmud Ibrahim, 22 Maret 2013).

Pengurus BPI kelihatannya selalu tertuju kepada gerak-gerik apa yang dilakukan oleh rekan-rekan seperjuangannya di pulau Jawa dalam memperjuangkan kepentingan bersama dan menghadapi musuh bersama, yaitu Belanda. Oleh karena itu, pada 17 Oktober 1945, nama organisasi mereka pun diubah menjadi PRI (Pemuda Republik Indonesia) (Djamil, 2009: 399). Ketika berlangsung kongres PRI di Malang pada 10 November 1945, Markas Daerah PRI Aceh mengirim tiga orang wakilnya, yaitu A. Madjid, Yacuk, dan Hasan Gayo. Sebaliknya, pada 26 November 1945, utusan dari Pulau Jawa, Semadi, datang pula ke Aceh dan memberikan briefing di Hotel Aceh tentang perubahan nama organisasi tersebut (Sulaiman, 1997: 120).

Berdasarkan hasil kongres tersebut, diputuskan bahwa PRI diubah lagi namanya menjadi Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia). Markas Pusat PRI yang telah menjadi Markas Pusat Pesindo mengirim instruksi kepada Markas Daerah PRI Aceh supaya segera mengubah namanya menjadi Pesindo. Akhirnya, pada 20 Desember 1945, markas daerah PRI Aceh mengubah lagi namanya menjadi Markas Daerah Pesindo (Ali *et al.*, 1983: 218). Dengan demikian, lengkaplah upaya untuk mengartikulasikan perjuangan dengan rekan seperjuangannya di Pulau Jawa.

Pada konferensi tersebut, peserta membentuk dua komisi IPI, yaitu Komisi Program Kerja dan Komisi Organisasi. Komisi Program Kerja antara lain menetapkan pembentukan barisan perjuangan sebagaimana halnya organisasi ketentaraan. Sementara Komisi Organisasi memutuskan merubah nama IPI menjadi BPI (Barisan Pemuda Indonesia). Komisi organisasi kemudian membentuk pula badan kelengkapan BPI yang terdiri atas enam badan. Badan kelengkapan tersebut, yaitu Badan Keuangan, Badan Kepanduan, Badan Penerangan, Badan Pengerahan Tenaga, Badan Keamanan, dan Badan Palang Merah.

Keputusan komisi-komisi dibahas lagi dalam suatu forum dan kemudian ditetapkan menjadi keputusan konferensi. Pada sidang pleno 6 Oktober 1945, sebagai sidang pleno terakhir menetapkan pimpinan BPI, sebagai berikut.

Ketua Umum : A. Hasjmy

Ketua I : M. Saleh Rahmany

Ketua II : Muhammad ZZ

Setiausaha Umum: Tuwanku Hasyim

Setiausaha I : Potan Harahap

Setiausaha II : Usman

Bendahara : Teuku Haji Jamin.

Ketua Badan Keuangan: M. Junat. Ketua

Badan Penerangan: Said Ahmad Dahlan.

Ketua Badan Pengerahan Tenaga: Teuku

Manyak Arif. Ketua Badan Keamanan:

Said Abdullah. Ketua Badan Kepanduan:

Murdani. Ketua Badan Palang Merah:

Asman. Pembantu-Pembantu: Anwar Manyak, Zaini Bakry, Tuwanku Abdulwahab, Ghazali Yunus, dan Azhar, M.A. Khaidir Anwar, Mukhtar Lubis, Jakfar Walad, Said Yasin, Salam, dan Korma (Hasjim, 1964: 2).

Struktur organisasi BPI yang disahkan pada konferensi tersebut, yaitu markas daerah terdiri atas enam badan kelengkapan dan satu sekretariat yang dipimpin oleh seorang Setia Usaha Umum. Di setiap kewedanaan dibentuk pula WMD (Wakil Markas Daerah), di setiap kecamatan dibentuk cabang, di setiap mukim dibentuk anak cabang, dan di setiap kampung didirikan ranting BPI.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemimpin PRI daerah untuk memperluas pengaruh mereka terhadap masyarakat. Propaganda dilakukan, baik terhadap orang Aceh maupun kelompok pendatang yang telah lama menetap di Aceh. Terhadap orang Aceh, mereka begitu beruntung karena para ulama yang telah bekerja pada birokrasi militer Jepang, baik secara bersama, yaitu Teungku Jakfar Sidik Lamjabat, Teungku Muhammad Daud Beureueh, Teungku Hasan Krueng Kalee, dan Teungku Hasballah Indrapuri pada 15 Oktober 1945, maupun secara pribadi Teungku Hasan Krueng Kalee pada 4 November 1945, mengeluarkan fatwa yang mendukung kemerdekaan sebagai kewajiban bagi orang Islam (Surat Kabar Semangat Merdeka pada 29 November 1945). Lebih dari itu, para ulama tersebut ikut juga ambil bagian sebagai pembicara dalam berbagai rapat pembentukan cabang atau ranting PRI di desa-desa di daerah Aceh Besar dan Pidie (Surat Kabar Semangat Merdeka, 18 dan 27 Oktober, 6,8,10, dan 20 November 1945).

Salah satu usaha PRI dalam meningkatkan jumlah anggotanya adalah dengan dikeluarkannya maklumat. Isi maklumat tersebut menyerukan atau panggilan umum yang ditujukan kepada semua pemuda di atas umur 18 tahun agar mendaftarkan diri menjadi anggota PRI di

daerah atau ranting setempat (Ali *et al.* 1983: 218).

b. Konferensi Daerah Pesindo II

Untuk mengevaluasi dan menyegarkan semangat organisasi, suatu panitia yang diketuai oleh H.M. Yamin dan Mas Mingun, dibentuk untuk mempersiapkan konferensi daerah II. Konferensi tersebut diselenggarakan di Kutaraja pada 15-17 Januari 1946. Pada konferensi tersebut bukan hanya memilih pengurus baru dan konsolidasi organisasi, melainkan juga membahas isu politik lokal, yaitu Perang Cumbok, koreksi terhadap susunan pemerintahan, pendudukan Jepang di Kuala Simpang, Belanda di Sabang, dan juga masalah ikut sertanya Belanda dalam kesatuan Sekutu.

Di antara hasil keputusan konferensi adalah penyusunan pengurus Markas Daerah yang baru. Dalam pemilihan pengurus baru, kepemimpinan Ali Hasjmy dan Tuwanku Hasjim tetap bertahan pada jabatan mereka. Acara pokok konferensi membicarakan berbagai masalah pertahanan, perjuangan, dan pemerintahan. Pada akhir konferensi, Pesindo mengeluarkan dua mosi yang disampaikan kepada presiden, Gubernur Sumatera, dan Residen Aceh, yaitu.

Mosi pertama:

- 1) Meminta Sekutu memerintahkan tentara Inggris supaya segera menyelesaikan pelucutan senjata Jepang, mengurus tawanannya, dan meminta tentara Jepang dan Inggris segera dikeluarkan dari Indonesia,
- 2) Meminta Inggris agar jangan membuka jalan kepada Belanda untuk menegakkan penjajahannya kembali di Indonesia,
- 3) Meminta Sekutu agar jangan mengizinkan kapal perang asing berlayar dalam batas teritorial Indonesia, jika tidak mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia,
- 4) Meminta supaya tentara Inggris jangan masuk ke Aceh karena tidak ada lagi tentara Jepang dan tawanannya,

- 5) Memprotes sikap tentara Inggris yang mengirim tentera Jepang ke Langsa sehingga terjadi pertempuran dan meminta Jepang yang masih berada di Kualasimpang diusir dari Aceh, dan
- 6) Meminta Sabang dikembalikan kepada Negara Republik Indonesia.

Mosi kedua:

- 1) Setelah memperhatikan bahwa pemerintahan di daerah Aceh hampir tidak berjalan dengan baik, Pesindo berpendapat bahwa hal yang demikian tidak boleh dibiarkan terus-menerus, karena:
 - a) Negeri rugi dan pergaulan hidup rusak, dan
 - b) Negeri luar, terutama musuh-musuh akan mengatakan bahwa kita tidak sanggup berdiri sendiri. Karena itu, Pesindo meminta kepada pemerintah supaya segala badan di dalam pemerintahan, seperti keagamaan, kehakiman, kepolisian, *bestuur*, keuangan, dan lain-lain hendaklah dijalankan dengan sebaik-baiknya (Talsya. Jilid I, 1990: 213).

c. Konferensi Daerah Pesindo III

Pada 14-18 Februari 1947, Pesindo menyelenggarakan konferensi daerah III di Kutaraja. Panitia konferensi diangkat Muhammad ZZ. Banyak permasalahan yang dibicarakan dalam konferensi, seperti masalah organisasi (pemilihan pengurus, pengesahan anggaran dasar rumah tangga, dan program kerja). Selain itu, masalah kenegaraan, yaitu blokade ekonomi oleh Belanda.

Kepemimpinan Ali Hasjmy-Tuwanku Hasjim masih tetap bertahan pada kedudukannya sebagai Ketua Umum dan Setia Usaha Umum pengurus harian Pesindo. Perubahan kepengurusan hanya terjadi pada susunan pengurus harian. Secara lengkap susunan kepengurusan Pesindo Daerah Aceh berdasarkan konferensi III, sebagai berikut. Ketua Umum: Ali Hasjmy. Ketua I: T.M. Amin. Ketua II: Moehammad Z.Z. Ketua III: A. Moenir. Setia-usaha Umum: Twk. Hasjim.

Setia-usaha I: Soelaiman Arsjad. Setia-usaha II: T.M. Daoed. Setia-usaha III: Bachtiar Loebis. Bendahara Umum: Haroen Joenoes (Talsya. Jilid II, 1990: 24-25).

Konferensi Pesindo III membentuk Dewan Keputerian yang tugasnya aktif di lapangan perjuangan bersenjata. Dari Dewan Keputerian tersebut dibentuk pula barisan Kesatria Puteri yang dinamakan Resimen Pocut Baren. Pada 13 April 1947, di Kutaraja berlangsung resepsi peresmian Keputerian Pesindo Daerah Aceh (Talsya. Jilid II, 1990: 24-25).

Satu di antara keputusan penting dari konferensi III, yaitu menyempurnakan Barisan Perjuangan Kesatria Pesindo berdasarkan usul Panglima Markas Besar Kesatria Pesindo, Nyak Neh. Konferensi kemudian menyetujui pembentukan satu divisi yang diberi nama Kesatria Pesindo Divisi Rencong, Kolonel Psd Nyak Neh diangkat sebagai Panglima. Satu upaya yang dianggap penting dalam rangka melaksanakan keputusan-keputusan Konferensi Daerah Pesindo III, yaitu pada 1 Oktober 1947, di Kutaraja diresmikan berdirinya sebuah taman kanak-kanak. TK tersebut diberi nama Taman Indera Pesindo dan sebagai TK pertama di Aceh setelah Indonesia Merdeka. Direktur pertama TK tersebut dijabat oleh Nyonya Fatimah Zahara Amelz (Hasjmy, 1985: 241).

d. Konferensi Daerah Pesindo IV

Sekalipun di daerah Aceh keadaan politik, sosial-ekonomi, dan pertahanan semakin membaik, tetapi di Pulau Jawa tempat kedudukan pemerintah pusat dan daerah-daerah lainnya semakin memburuk. Pertentangan antara "golongan kiri/komunis" di satu pihak dengan golongan Islam dan Nasionalis di lain pihak, semakin menajam. Pesindo Sumatera di bawah pimpinan Sarwono mendesak Pesindo Aceh supaya menyesuaikan diri dengan program perjuangan Pesindo Pusat.

Dalam situasi demikian, Pesindo Aceh menyelenggarakan konferensi yang berlangsung pada 20--23 Maret 1948 bertempat di Langsa, ibukota Kabupaten Aceh Timur. Konferensi ini merupakan konferensi Daerah Pesindo pertama kali berlangsung di luar Kutaraja (Hasjmy, 1985: 241).

Hal-hal yang dibicarakan dalam konferensi tersebut adalah memilih pengurus baru dan masalah penyatuan organisasi Pesindo Aceh dengan Sumatera Timur (Sumatera Utara). Selain itu, dibicarakan juga masalah aktivis Pesindo asal Sumatera Timur yang mengungsi ke Aceh, masalah peleburan lasykar ke dalam tentara reguler, dan penyusunan rencana kerja tiga tahunan. Konferensi Daerah Pesindo IV di Langsa juga menyempurnakan program kerja yang telah diputuskan dalam Konferensi Daerah Pesindo III. Rencana tersebut meliputi bidang pertahanan, pendidikan dan kebudayaan, ekonomi, sosial, perburuhan, dan penerangan.

2. Kiprah dan Peranan Pesindo Aceh

a. Perjuangan Mendapatkan Senjata

Menjelang akhir pendudukan Jepang, bentrokan fisik antara pemuda dengan pihak Jepang tidak dapat dihindarkan. Hal yang demikian disebabkan para pemuda yang tidak sabar lagi agar Jepang segera meninggalkan Aceh, mulai melancarkan tekanan-tekanan terhadap Jepang dan menuntut pasukannya agar menyerahkan senjata kepada pihak republik. Selama bulan November dan Desember 1945, tekanan-tekanan yang dilancarkan terhadap Jepang berlangsung di seluruh Aceh tempat Jepang mengkonsentrasikan pasukannya. Anggota-anggota Pesindo juga ingin mendapatkan senjata yang lebih banyak dari Jepang. Oleh karena itu, mereka mengepung dan menyerang pangkalan udara Jepang yang terletak di Lhoknga, dekat Kutaraja, pada akhir November 1945. Ketika Jepang mengundurkan diri dari Lhoknga itulah Jepang meninggalkan

senjata dalam jumlah yang banyak, termasuk senjata-senjata berat, seperti meriam penangkis serangan udara. Banyaknya senjata yang jatuh ke tangan Pesindo di pangkalan udara Lhoknga dan tempat-tempat lain telah memungkinkan organisasi ini membentuk satu divisi militer di bawah pimpinan Nyak Neh (Hasjim, 1964: 7). Pangkalan udara tersebut, oleh para pemuda Pesindo dijadikan markas divisi mereka yang diberi nama Kesatria Divisi Rencong.

Setelah berhasil menguasai sebagian besar senjata Jepang dan menerima pelatihan dalam waktu yang terbatas, para pemuda siap memper-tahankan republik. Baik pemuda yang berlatar belakang pendidikan agama maupun sekuler sama-sama mendasarkan perjuangannya untuk membela kemerdekaan.

b. Laskar Kesatria Divisi Rencong

Sejalan dengan perubahan nama PRI menjadi Pesindo, Barisan Perjuangan PRI berubah pula namanya menjadi Kesatria Pesindo. Pada 29 November 1945, Batalyon Istimewa Divisi Rencong resmi dibentuk di Lhoknga, Aceh Besar. Batalyon tersebut dijadikan salah satu inti kekuatan menghadapi serangan Belanda, baik di Aceh maupun di Sumatera Timur. Pimpinan Batalyon dijabat langsung oleh Panglima Divisi Rencong, Nyak Neh (Talsya, Jilid I, 1990: 145). Basis kekuatan Kesatria Pesindo berada di Lhoknga, Aceh Besar. Mereka menguasai bengkel senjata peninggalan Jepang dan memperkerjakan seorang instruktur dari serdadu Jepang yang desersi (Wawancara dengan Mahmud Ibrahim, 22 Maret 2013).

Untuk memperkuat posisi Pesindo sebagai badan perjuangan dan menindaklanjuti hasil keputusan konfe-rensi, Divisi Rencong Kesatria Pesindo berada langsung di bawah ketua umum Dewan Pimpinan Umum Pesindo Aceh, Ali Hasjmy. Panglima Divisi dijabat oleh Nyak Neh dengan pangkat Panglima Muda (Jenderal Mayor) dan M. Saleh Rahmany sebagai kepala staf. Staf Divisi terdiri atas

Umar Husni, Pawang Leman, Koser Cokrosentono, dan K. Ali (Kurewa). Divisi Rencong yang berkedudukan di Lhoknga dilengkapi dengan 1 Resimen Wanita Pocut Baren di bawah komandan Muhammad ZZ, Kepala Staf dijabat oleh Zahara Pohan dan 7 Resimen yang terdapat di setiap kabupaten (Ghazaly, 1978: 20; Jarahdam, 1972: 103-105).

Pertumbuhan lasykar Kesatria Pesindo yang demikian cepat, mendorong pengurus Pesindo untuk menyelenggarakan Konferensi Barisan Kesatria di Kutaraja pada 15 September 1946. Konferensi dilakukan untuk membicarakan masalah pembinaan, penyempurnaan organisasi, dan program perjuangan. Konferensi memutuskan pemberian pangkat kehormatan Senapati Muda (setara mayor pada tentara regular) kepada ketua-ketua WDM (Wakil Markas Daerah) Pesindo yang berada di setiap kewedanan. Selain itu, meningkatkan disiplin dan koordinasi Kesatria Pesindo Divisi Rencong di bawah komandan Nyak Neh yang berpangkalan di Lhoknga. Sejak akhir tahun 1946, kesatuan milisi Pesindo secara bergilir dikirim ke front Medan Area bersama tentara regular (Abdullah, 2011: 38). Oleh karena itu, pada 20 Juni 1948, Presiden Soekarno sebelum meninggalkan Aceh, menyempatkan diri untuk meninjau pabrik senjata dan usaha-usaha pembangunan Pesindo di Lhoknga. Presiden dan rombongan merasa kagum atas kemampuan dan persenjataan yang dimiliki oleh putera-putera Aceh tersebut (Talsya, Jilid II, 1990: 357).

Markas Daerah Pesindo Aceh pada 18 Februari 1947, mengumumkan berdirinya Kesatria Pesindo Divisi Rencong yang dipimpin oleh seorang Panglima Divisi dan dibantu oleh Komandan Staf Umum Divisi (Kepala Staf), seperti sudah disebutkan di atas. Bertempat di Tanah Lapang Gajah Kutaraja, dilantik Nyak Neh menjadi panglima divisi dengan pangkat Panglima Muda (Jendral Mayor) dan M. Saleh Rahmany menjadi Komandan Staf Umum

Divisi (Kepala Staf Divisi) dengan pangkat Senapati Tinggi (Kolonel). Selanjutnya, diumumkan pula bahwa Konferensi Daerah Pesindo III telah mengangkat Ali Hasjmy dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum Markas Daerah Pesindo, menjadi Pemimpin Umum Kesatria Pesindo Divisi Rencong (Hasjmy, 1985: 255).

Usaha-usaha ke arah pembentukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus-menerus dilakukan di Kutaraja, terutama di Kantor Gubernur Militer, Komando Tentera Divisi X, Markas Daerah Kesatria Pesindo Divisi Rencong, dan Markas Divisi Tgk. Chik di Tiro. Untuk menghilangkan perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terkait, sering diadakan rapat untuk memudahkan ke arah realisasi keputusan pemerintah. Untuk itu, pada Desember 1947, Instruktur Pesindo Daerah Sumatera mengumumkan: *pertama*, segenap angkatan perang Kesatria Pesindo seluruh Sumatera serentak turut mengambil bagian dalam usaha pembentukan Tentara Nasional Indonesia secara resmi. *Kedua*, pelaksanaan dalam praktik berkenaan dengan teknik, organisasi, administrasi, dan lain-lain. Hal yang demikian harus dilaksanakan secara seksama dan bijaksana atas dasar kesepakatan bersama di seluruh daerah-daerah keresidenan. Dalam pelaksanaan tersebut, pimpinan-pimpinan Dewan Daerah bertanggung jawab kepada Dewan Pusat (Hasjmy, 1985: 218).

Menindaklanjuti upaya pembentukan TNI, Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo memerintahkan Kepala Kesatuan Divisi Rencong, Kepala Kesatuan Divisi X Tgk. Tjhik di Tiro, dan Kepala Kesatuan Divisi Tgk. Tjhik di Paya Bakong supaya selambat-lambatnya pada 30 Mei 1948 sudah bergabung dalam kesatuan TNI Divisi X Sumatera. Setelah tanggal tersebut dianggap sudah tidak ada lagi lasykar bersenjata selain TNI dan Polisi Negara. Untuk itu, panglima Divisi Rencong dan Ketua Umum Pesindo Daerah mengumumkan pula bahwa mulai

1 Juni 1948, Kesatria Pesindo Divisi Rencong digabungkan dalam kesatuan TNI (Talsya. Jilid II, 1990: 297).

c. Perjuangan di Medan Area

Setelah Jepang kalah dari Sekutu, Belanda melancarkan aksi militer pertama terhadap Republik Indonesia pada 21 Juli 1947. Untuk menandai serangan tersebut, di Aceh pesawat-pesawat tempur dan pembom Belanda menyerang pangkalan pasukan Pesindo, Divisi Rencong, di Lhoknga pada 21 Juli 1947. Dari laut, kapal Belanda menembaki pula Ulee Lheue, pelabuhan Kutaraja. Selanjutnya, beberapa kota lain, seperti Bireuen dan Lhokseumawe diserang dari udara. Namun, Belanda tidak berani mendaratkan pasukannya ke Aceh. Untuk menghadapi kemungkinan serangan oleh pihak Belanda, Dewan Pertahanan Daerah memutuskan untuk melakukan mobilisasi umum sejak 25 Juli 1947. Untuk itu, pimpinan Divisi Rencong Pesindo dan Divisi Teungku Chik Ditiro (nama baru dari pasukan Mujahidin) memerintahkan pasukannya untuk bekerjasama dengan kekuatan-kekuatan TRI dan polisi. Semua pasukan diinstruksikan untuk melawan musuh tanpa harus menunggu perintah lebih lanjut dari Dewan Pertahanan (Kementerian Penerangan, 1953: 142-143).

Sebagai tanggapan aktif Pesindo Aceh terhadap keamanan dan keselamatan bangsa, pada 8 Januari 1947, pasukan Batalyon Istimewa Divisi Rencong di bawah pimpinan Panglima Divisi dan stafnya diberangkatkan ke front Medan Area. Hal itu, dimaksudkan untuk membantu pertahanan di Sumatera Timur (Sumatera Utara) dari Agresi Belanda (Talsya. Jilid II, 1990: 12).

Mengantisipasi kekurangan dana dan perbekalan perang, pada 20 April 1947, Dewan Pimpinan Pesindo Keresidenan Aceh melangsungkan rapat pleno di Kutaraja. Rapat tersebut dihadiri oleh anggota Dewan Pimpinan, Wakil-Wakil Markas Daerah, Cabang, Ranting, dan Seksi-Seksi dalam Kewedanaan

Kutaraja. Dalam rapat tersebut dibicarakan usaha peningkatan sumbangan Pesindo terhadap perjuangan di front Sumatera Timur. Selain itu, disepakati pula untuk mengerahkan tenaga-tenaga baru ke front perjuangan Medan Area sebagai penyegaran terhadap pejuang-pejuang yang telah lama di sana (Talsya. Jilid II, 1990: 67).

Demikian juga dengan kesiapan pasukan, pada 20 Juni 1947, Kesatuan-kesatuan Kesatria Pesindo Divisi Rencong dalam jumlah besar dikirim ke Sumatera Timur untuk memperkuat pertahanan. Markas Daerah Pesindo dan Komando Kesatria Pesindo Divisi Rencong memanggil segenap anggotanya pada setiap cabang, mereka diperintahkan agar selalu siaga menghadapi setiap kemungkinan yang terjadi akibat Agresi Belanda (Talsya. Jilid II, 1990: 91).

d. Pembelaan terhadap Kedaulatan RI

Pesindo Aceh terus-menerus mendukung kedaulatan Republik Indonesia, di antaranya dengan memerangi gerakan pengacau keamanan dan reaksioner. Tindakan-tindakan pihak *ulee-balang* yang sudah meresahkan sebagian masyarakat sehingga pemimpin rakyat yang dimotori oleh Pesindo mengkoordinir secara terpadu untuk melawan gerakan pengacau keamanan (wawancara dengan Ali Husen, 14 Februari 2001). Hasan Aly beserta rekan-rekannya menyelenggarakan rapat koordinasi di mesjid Kampung Are yang terletak 6 km dari Sigli pada 22 Desember 1945. Rapat dihadiri oleh 45 tokoh Pesindo yang berasal dari wilayah Lammeulo dan Sigli, mendengar *preadvis* yang disampaikan oleh Teungku Umar Tiro dan Hasan Aly. Setelah musyawarah, disepakati memerangi pasukan Cumbok di kota Lammeulo (Arif, 1946: 15). Untuk itu, mereka membentuk pula badan koordinasi yang diberi nama MBRU (Markas Besar Rakyat Umum). Teungku Umar Tiro yang telah mengungsi menghindari intimidasi pasukan BPK Cumbok, dipercayakan sebagai panglima

perang dan sekaligus sebagai penasihat. Pucuk pimpinan organisasi dijabat oleh Hasan Aly yang dibantu oleh Peutua Husin, Teungku Banta, Hasballah Daud, dan T.M. Amin (Sulaiman, 1997: 135).

Pihak Pesindo bersikap tegas dalam sidang Komite Nasional Daerah bahwa komite harus mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengatasi keadaan yang kacau di Kabupaten Pidie (Sjamsuddin, 1999: 166). Sehari kemudian, pada 8 Januari 1946, MBRU kembali mengadakan sidang untuk mengevaluasi secara lebih dekat perkembangan di Kabupaten Pidie. Rapat dipimpin oleh Sjamaun Gaharu dihadiri oleh 20 orang peserta, antara lain Wakil Residen Muhammad Ali Panglima Polim, Muhammad Daud Beureueh, Ismail Yakub, Ali Hasjmy, dan Husein Jusuf sebagai wakil TKR (Sjamsuddin, 1999: 167). Rapat dengan suara bulat memutuskan “mengambil tindakan untuk memusnahkan pengkhianat-pengkhianat Republik di Cumbok dan sekitarnya, untuk mengembalikan keamanan rakyat di Kabupaten Pidie” (Sjamsuddin, 1999: 167). Keputusan tersebut diambil setelah rapat mendengarkan keterangan mengenai keadaan terakhir di daerah Pidie sebagaimana yang disampaikan oleh tiga orang anggotanya, yaitu Ali Hasjmy, Sjamaun Gaharu, dan Ismail Yakub. Dalam rapat tersebut vonis terhadap kaum *uleebalang* Cumbok diputuskan. Pesindo juga mengusulkan agar MBRU dan pemerintah segera menyelesaikannya (Wawancara dengan Ali Husen, 14 Februari 2001).

Tindakan terakhir yang dilakukan oleh pihak Pesindo adalah serangan besar-besaran terhadap pihak *uleebalang*. Begitu benteng *uleebalang* digempur, Teuku Muhammad Daud Cumbok bersama 17 orang teman dekatnya melarikan diri ke pegunungan Seulawah. Namun, mereka berhasil ditangkap dan dihukum mati oleh suatu pengadilan rakyat yang diadakan di Sanggeu. Pelaksanaan hukuman mati terhadap tokoh-tokoh utama *uleebalang* bervariasi waktunya, yaitu antara

pertengahan hingga akhir Januari 1946 (Reid, 2011: 325). Pada 17 Januari 1946, sebelum menjalani hukuman mati, Teuku Muhammad Daud membuat pengakuan tertulis mengenai langkah-langkah yang telah ditempuhnya. Apabila pengakuan yang singkat itu dapat dijadikan pegangan, akan dapat mengungkapkan banyak hal yang selama ini belum jelas. Dari sana pula akan muncul penilaian dan kesimpulan baru yang menggoncangkan mengenai jalannya revolusi nasional di Aceh (Ali *et al.*, 1983: 244).

Di antara organisasi milisi, Pesindo yang paling militan dalam memojokkan *uleebalang*. Ketika penutupan konferensi Pesindo yang berlangsung di Kurtaraja pada 17 Januari 1946, Pesindo mengeluarkan pernyataan bahwa susunan pemerintahan di Aceh hendaklah berdasarkan susunan kedaulatan rakyat dengan menyingkirkan pegawai yang kurang revolusioner. Oleh karena itu, semua pejabat pemerintah sejak kepala desa hingga jabatan tinggi harus dipilih oleh rakyat (Sulaiman, 1997: 143). Sejak itu, Pesindo giat melakukan pengumpulan sumbangan amal dari masyarakat untuk membantu rekan-rekannya yang telah menderita korban dalam perang Cumbok di Pidie.

Kejadian yang dikenal sebagai peristiwa Cumbok terjadi pada akhir 1945. Dinamakan demikian karena mengikuti nama satu wilayah di Kabupaten Pidie, tempat markas besar front *uleebalang*. Menurut Pesindo, peristiwa tersebut tidak mempunyai suatu hubungan apa pun dengan garis konflik ulama/Pesindo dengan *uleebalang* karena mereka berpendapat bahwa kejadian tersebut tidak akan terjadi seandainya kaum *uleebalang* tidak menentang republik.

e. Perjuangan Menentang Komunis

Persatuan Perjuangan dibentuk di Solo pada 15 Januari 1946, tetapi organisasi tersebut mengalami kemunduran di Pulau Jawa tidak lama setelah pembentukannya (Kahin, 1970:

172-178). Namun demikian, Persatuan Perjuangan terus berkembang di Sumatera. Sarwono Soetardjo, pemimpin Pesindo Sumatera Timur, mendirikan Markas Persatuan Perjuangan untuk Sumatera di Medan dan mengangkat dirinya sebagai ketua.

Perkembangan tersebut menyadarkan para pemimpin Aceh bahwa Pesindo Sumatera telah dikuasai oleh orang yang berhaluan kiri. Oleh karena itu, Teungku Muhammad Daud Beureu-e-h menyalahkan Ali Hasjmy yang telah mengubah nama PRI menjadi Pesindo pada bulan November 1945. Dalam pandangan Daud Beureu-e-h, Pesindo jelas merupakan sebuah organisasi komunis (Sjamsuddin, 1999: 214).

Tundungan terhadap Ali Hasjmy tidak diterima oleh pemimpin Pesindo Aceh. Mereka menolak tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa mereka membutuhkan organisasi seperti Pesindo sebagai organisasi formal, walaupun ideologi mereka berbeda dari Pesindo di luar Aceh. Dengan argumentasi yang demikian, mereka tetap mempertahankan Pesindo sebagai nama bagi organisasinya (Wawancara dengan Mahmud Ibrahim, 22 Maret 2013).

Teungku Muhammad Daud Beureu-e-h serta para pengurus PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) lainnya tidak dapat memaksa pemuda untuk mengubah nama organisasi tersebut. Namun, mereka tetap merasa tidak senang, sebab usulan mereka telah diabaikan begitu saja. Akan tetapi, kecurigaan terhadap pemimpin-pemimpin Pesindo di Kutaraja berkurang dengan sendirinya karena para pemimpin PUSA merasa yakin akan posisi Aceh dalam hubungannya dengan perkembangan di tingkat nasional. Sejalan dengan itu, para pemimpin Pesindo di Kutaraja (Banda Aceh) pun menunjukkan dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam segala bidang sehingga kenyataan itu bertolak belakang dengan kebijakan Pesindo di luar Aceh. Dalam hubungan itulah, sebagai tanggapan terhadap

program Persatuan Perjuangan, pada 5 Februari 1946, Komite Nasional mengirimkan telegram kepada Perdana Menteri Sjahir, isinya memberikan jaminan kepada pemerintahannya akan dukungan rakyat Aceh (Raliby, 1953: 223).

Pada Juli 1946, Komite Nasional juga mengutuk tindakan Persatuan Perjuangan yang menculik Sjahir. Pesindo Aceh tidak membentuk Persatuan Perjuangan sebagaimana di Sumatera Timur dan Tapanuli. Hal itu, menyebabkan Teungku Muhammad Daud Beureu-e-h beserta kawan-kawannya yakin bahwa identitas politik Pesindo Aceh berbeda dengan cabang-cabang Pesindo di Sumatera ataupun di Pulau Jawa.

Pesindo Aceh menolak ideologi komunis sehingga membuat tidak senang Pesindo di luar Aceh. Sarwono Soetardjo sebagai pemimpin Pesindo Sumatera Timur selalu berusaha memengaruhi Pesindo Aceh, di antaranya dengan menyusupkan orang-orang Pesindo Sumatera Timur bersama pengungsi ke Aceh, terutama di Aceh Timur. Di Aceh Timur terdapat buruh non-Aceh yang banyak jumlahnya di perkebunan karet dan pertambangan minyak. Oleh karena itu, Riphath Senikentara, ketua Persatuan Perjuangan Sumatera Timur, membawa masuk SBMSU (Serikat Buruh Minyak Sumatera Utara) ke Aceh Timur. Sementara Sarwono mendirikan markas Pesindo Sumatera Utara di Aceh Timur dan SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) Sumatera Utara yang dipimpin oleh B. Hutadjulu (Insider, 1950: 77).

Perkembangan itu dengan sendirinya menimbulkan perbedaan yang tajam antara Pesindo kelompok Kutaraja (Banda Aceh) dengan Pesindo Langsa (Aceh Timur). Pemimpin Pesindo Kutaraja tidak senang akan saingan mereka yang beraktivitas di bagian timur Aceh. Akibatnya, terjadi penangkapan secara besar-besaran terhadap tokoh-tokoh Pesindo yang berhaluan komunis di Langsa.

f. Perjuangan Bidang Sosial-Ekonomi

“Satu di antara usaha yang menjadikan perhatian bersama, terutama oleh pemimpin Pesindo di daerah Aceh”, tulis Muhammad ZZ ialah masalah ekonomi. Organisasi tidak mungkin maju seandainya ekonomi yang menjadi jiwa pergerakan masih morat-marit. “Dengan adanya uang” kata M. Yunat, kepala Badan Perbendaharaan Pesindo, segala cita-cita yang terpendam dapat dibangun dan tercapai” (Majalah *Dharma* No. 8 tanggal 10 Desember 1947).

Pendapat kedua pengurusnya membersihkan keinginan Pesindo untuk bergerak dalam lapangan ekonomi guna menjawab kebutuhan anggotanya. Keadaan yang demikian dapat dimengerti, mengingat situasi kehidupan ekonomi yang sulit di Aceh sejak masa pendudukan Jepang. Hal itu, dimaksudkan untuk menunjang dan memperkuat Republik Indonesia yang baru diproklamkan. Rakyat Aceh tidak saja mendirikan organisasi-organisasi politik dan sosial, tetapi juga mendirikan organisasi-organisasi ekonomi dan keuangan. Dalam hal ini Pesindo telah mengambil bagian yang penting dalam pembangunan bidang ekonomi dan kemasyarakatan dengan mendirikan berbagai usaha di bidang ekonomi dan kemasyarakatan (Wawancara dengan Abdullah, 21 April 2013).

Bertolak dari hasrat perjuangan dan mensejahterakan anggotanya, sebuah Cabang Kemakmuran Pesindo dibuka pada 4 Desember 1945 di Kutaraja di bawah pimpinan dua orang pedagang setempat, yaitu M. Daud dan T. Mahmud. Cabang Kemakmuran menangani penyediaan beras dan penjualan lencana serta menawarkan andil kepada anggotanya sebanyak Rp 100 persero.

Kebutuhan bengkel bagi reparasi kendaraan, mendorong pula Badan Kemakmuran Pesindo membuka bengkel pada 1 April 1946 di Kutaraja. Kebutuhan transportasi yang menghubungkan Kutaraja dengan wilayah pantai barat, pada Mei 1946, Badan Kemakmuran Pesindo

membuka sebuah perusahaan Peshico (*Pesindo Shipping Company*) di Kutaraja yang mengoperasikan motor boat dan tongkang. Pada 1 Desember 1946, badan tersebut membuka pula Bank Pesindo di bawah pimpinan Saroni di Kutaraja (Ghazaly, 1978: 19).

Pada 26 Januari 1947, Pesindo Trading Company (Petraco) sebagai bagian dari Badan Kemakmuran Pesindo Keresidenan Aceh dibuka di Kutaraja. Perusahaan tersebut mempunyai cabang di Lhokseumawe, Penang, dan Singapura yang bergerak dalam bidang impor-ekspor. Hasilnya, pada tahun 1947 Petraco mendapat laba Rp 2.806.126.39. Sementara Peshico mengoperasikan 3 motor boat, 3 tongkang besar, dan beberapa tongkang kecil. Hanya usaha koperasi yang tidak begitu berkembang.

Dengan Surat Ketetapan Kepala Jawatan Keuangan Sumatera yang bertanggal 15 Januari 1947 No. 15/KNW, Bank Pesindo di Kutaraja ditetapkan boleh menerima simpanan (Talsya, Jilid II, 1990: 14). Oleh karena itu, pada 1 April 1948, Bank Pesindo Pusat di Kutaraja mengumumkan penjualan sero pendirian dan sero biasa dari *Pustaka Dharma Limited* yang bermodal f.50.000.000. Seri pendirian berharga f.10.000, sedangkan sero biasa f.2.500. *Pustaka Dharma Limited* bergerak dalam bidang percetakan, penerbitan, dan toko buku (Talsya, Jilid II, 1990: 274).

Badan-badan usaha tersebut berkewajiban mengusahakan berbagai kelengkapan serta dana untuk menunjang perjuangan Pesindo sehingga dalam melaksanakan program perjuangannya tidak terkendala. Pihak Pesindo berusaha bagi kelengkapan dan dana yang diperlukan dengan menempuh jalan yang sah, tidak bertentangan dengan hukum dan kemasyarakatan.

Selain kegiatan dalam bidang di atas, Pesindo juga bergerak di bidang pembangunan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, pada 13 Juli 1947, Pesindo Daerah Aceh, di Lhoknga, Aceh Besar

dibuka sebuah Poliklinik Pesindo untuk umum. Selain itu, didirikan Bank Kemakmuran dan badan-badan sosial (Talsya. Jilid II, 1990: 103). Demikian pula pada 1 Oktober 1947, Taman Indra (*Frobel School*) Pesindo dibuka di Kutaraja. Di samping perjuangan bersenjata, usaha-usaha ke arah pendidikan dan pembangunan dilakukan secara berkesinambungan.

Untuk menampung aspirasi dan mempertemukan sesama anggota perjuangan, pada 9 November 1947, Pesindo Daerah Aceh meresmikan pembangunan Taman Persahabatan di Kutaraja. Di taman tersebut dibuka kesempatan yang luas bagi para pejuang untuk bertemu antara satu dengan yang lain.

Pada 19 Februari 1946, Belanda melakukan provokasi, baik dari laut maupun dari udara semakin sering terjadi di seluruh Aceh. Untuk itu, kesiapsiagaan pada kubu-kubu pertahanan dan kewaspadaan masyarakat terus-menerus ditingkatkan untuk menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi. Oleh karena itu, bagian Kemakmuran Markas Daerah Pesindo Aceh menyerukan para saudagar guna bahu-membahu dalam membantu negara. Melalui maklumatnya No.4, Ketua Markas Pesindo Bagian Kemakmuran menyerukan, sebagai berikut.

Kepada saudagar-saudagar Indonesia. Merdeka! Saudagar-saudagar adalah sebagai prajurit negara yang harus siap-sedia melatih diri membasmi sifat loba dan tamak, dan membina masyarakat saudagar baru yang merdeka untuk membangun perekonomian yang sehat. Mengalirnya barang-barang atau makanan, pakaian, beras dan lain-lain ke satu jurusan (tangan) serta disimpan untuk spekulasi (menunggu-nunggu naik harga untuk keuntungan yang lebih besar) adalah sifat kapitalis yang mesti

disingkirkan untuk menciptakan kemakmuran negara dan rakyat.

Hindarkan kekayaan hari ini yang membahayakan dan meruntuhkan, untuk menghasilkan kekayaan esok yang kekal dan memakmurkan. Buktikanlah kesanggupan dan berlomba-lombalah dalam menyusun negara menurut dasar Indonesia Merdeka (Talsya. Jilid I, 1990: 250).

3. Berakhirnya Riwayat Pesindo Aceh

Apabila diperhatikan secara saksama, jelaslah bahwa personalia Pesindo mewakili hampir seluruh segmen sosial di Aceh, seperti yang tercermin dalam hasil konferensi IV Pesindo. Hal itu disebabkan, menurut Anggaran Rumah Tangga Pesindo, persyaratan anggotanya adalah pemuda yang berusia 15 tahun ke atas tanpa memperhatikan ideologi dan agama yang mereka anut. Kelonggaran yang demikian menyebabkan aktivis Pesindo bergabung pula dengan berbagai kekuatan politik yang tumbuh di Aceh sejak bulan November 1945.

Sejak itu, aktivis Pesindo mulai merosot. Mereka menyalurkan berbagai aktivitas politiknya melalui berbagai kepartaian. Menurut daftar anggota DPK (Dewan Perwakilan Kabupaten) pada tahun 1949, hanya di Aceh Utara dan Aceh Selatan terdapat minoritas anggota DPK yang memakai bendera Pesindo. Tiga orang anggota DPK Aceh Besar, yaitu Teungku Syekh Marhaban, Ali Hasjmy, dan A. Jalil Anin membawa bendera PSII dan sekaligus Pesindo. Badan-badan usaha yang telah mereka bentuk lambat laun lepas dari kendali organisasi, yaitu berhenti aktivitasnya atau beralih menjadi milik pribadi mantan pengurus Pesindo. Dengan kepindahan Ali Hasjmy dan Twk. Hasjim ke Medan pada awal 1952, riwayat Pesindo Aceh berakhir pula.

D. PENUTUP

Masyarakat Aceh memerlukan artikulasi kekuatan dengan kelompok sosial lain yang terdapat di Aceh maupun

di luar Aceh dalam menghadapi ancaman Belanda yang menjadi pelindung status quo. Oleh karena itu, aktivis Pesindo sangat giat mengeliminasi hulubalang, bukan saja selama Perang Cumbok, tetapi juga setelah hulubalang kehilangan kekuasaan. Lahirnya Pesindo merupakan bagian dari konsolidasi untuk mengakhiri peranan hulubalang dalam perpolitikan Aceh. Kekhawatiran masyarakat Aceh bahwa PKI akan mengambil alih Pesindo sebagai wadah organisasinya di Aceh merupakan bagian dari alasan diterimanya Pesindo di Aceh. Asas kedaulatan rakyat yang ditawarkan oleh Pesindo sebagai daya tarik bagi elit Aceh untuk bergabung ke Pesindo.

Pesindo berperan aktif dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, terutama pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Peranan tersebut dilakukan dalam bentuk menjaga keamanan, baik keamanan di dalam maupun ancaman keamanan dari luar. Pembentukan Lasykar Divisi Rencong merupakan wujud keikutsertaan Pesindo Aceh dalam menjaga keamanan dan kedaulatan Republik Indonesia.

Masyarakat bergabung ke dalam Pesindo yang sosialisme bukan berarti fundamen orientasi politik elit Aceh yang terikat kepada nilai atau simbol suku, kekerabatan, dan agama menjadi hilang. Pesindo Aceh tidak terpengaruh oleh Pesindo di luar Aceh yang beraliran sosialis-komunis, tetapi sebaliknya, organisasi lokal tersebut dimanfaatkan untuk membela kepentingan nasional.

DAFTAR SUMBER

1. Buku

Abdullah, M. Adli. 2011.

Membedah Sejarah Aceh. Banda Aceh: Bandar Publishing.

Abdurrahman, Dudung. 2007.

Metodologi Penelitian Sejarah. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Ali, Abdullah *et al.* 1983.

Sejarah Perjuangan Rakyat Aceh dalam Perang Kemerdekaan 1945-1949. Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Arif, Abdullah. 1946.

Di Sekitar Peristiwa Pengchiatan Tjoembok. Koetaradja: Semangat Merdeka.

Djamil, M. Junus. 2009.

Gerakan Kebangkitan Aceh. Bandung: Bina Biladi Press.

Ghazaly, H.A. 1978.

Biografi Prof. Ali Hasjmy. Jakarta: SOCIALIA.

Hamka. 1966.

Kenang-Kenangan Masa Lampau. Kuala Lumpur: Pustaka Antara.

Hasjim, Twk. 1946.

"Riwayat Gerakan Pemoeda (Pesindo) di Daerah Atjeh". *Naskah Ketikan*. Kutaraja, 9 Februari 1946. Akan tetapi, menurut Ali Hasjmy, rapat dilaksanakan pada 21 Agustus 1945 di kantor *Atjeh Sinbun*, Kutaraja.

———. 1947.

"Pesindo dalam Sejarah". Dalam *Majalah Dharma* No. 8. Tanggal 10 Desember 1947.

———. 1964.

"Perjuangan Pemuda Atjeh Periode 1928-1945". *Makalah* yang disampaikan pada seminar tentang Sejarah Perjuangan Pemuda di Aceh. Kutaraja: November 1964.

Hasjmy, Ali. 1985.

Semangat Merdeka. 70 Tahun Menempuh Jalan Pergolakan dan Perjuangan Kemerdekaan. Jakarta: Bulan Bintang.

Indonesia. Kementerian Penerangan. 1953.

Propinsi Sumatera Utara. Jakarta: Kempen.

Insider. 1950.

Atjeh Sepintas Lalu. Jakarta: Archapada.

Jarahdam I/Iskandar Muda. 1972.

Dua Windu Kodam-I/Iskandar Muda. Banda Aceh: Jarahdam-I/Iskandar Muda.

- Jerri, D. Rose. 1974. *Introduction to Sociology*. Chicago: Rand Mc Nolly College Publishing Coy.
- Kahin, George McTurnan. 1970. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca NY dan London: Cornell University Press.
- Kementerian Penerangan RI. *Republik Indonesia Propinsi Sumatera Utara*. Jakarta: 1953.
- Kuntowijoyo. 2005. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Pustaka
- Liddle, William. 1970. *Ethnicity, Party and National Integration*. London: Yale University Press.
- Muhammad ZZ. 1947. "Bangunlah Serentak Menyusun Ekonomi Rakyat". Dalam *Dharma* No. 8 tanggal 10 Desember 1947. Pidato ketua Badan Perbendaharaan, M. Yunad. Dalam Berita Conferentie Majelis Pesindo Daerah Atjeh ke-III.
- Pikaar, A.J. 1998. *Aceh dan Peperangan dengan Jepang*. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh.
- Pranoto, Suhartono W. 2010. *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Raliby, Osman. 1953. *Dokumenta Historica*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Reid, Anthony. 2011. *Menuju Sejarah Sumatera*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sjamsuddin, Nazaruddin. 1999. *Revolusi di Serambi Mekah*. Jakarta: UI Press.
- Sulaiman, M. Isa. 1994. *Agresivitas, Revolusi, dan Pemberontakan: Aceh 1942-1962*.
- _____.1997. *Sejarah Aceh: Sebuah Gugatan terhadap Tradisi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Talsya, TA. 1990. *Batu Karang di Tengah Lautan (Perjuangan Kemerdekaan di Aceh 145-1946)*. Jilid I. Banda Aceh: Lembaga Sejarah Aceh.
- _____.1990. *Modal Perjuangan Kemerdekaan (Perjuangan Kemerdekaan di Aceh 1947-1948)*. Jilid II. Banda Aceh: Lembaga Sejarah Aceh, 1900.
- _____. 1990. *Sekali Republikan Tetap Republikan (Perjuangan Kemerdekaan di Aceh 1949)*. Jilid III. Banda Aceh: Lembaga Sejarah Aceh.
- Volksteelling 1934. *Inheemsche Bevolking van Sumatra* deel IV. Departement van Economische Zaken, Balaira.

2. Surat Kabar

- Majalah *Dharma* No. 8 tanggal 10 Desember 1947.
- Surat Kabar Semangat Merdeka, 18 dan 27 Oktober, 6,8,10, dan 20 November 1945).
- Surat Kabar Semangat Merdeka pada 29 November 1945).

3. Sumber Lisan

- Abdullah (74 tahun). Sejarawan/Budayawan. *Wawancara*. Banda Aceh, 21 April 2013.
- Ali Husen (86 tahun). Mantan Skojotai. *Wawancara*. Sigli, 14 Februari 2001.
- Mahmud Ibrahim (84 tahun). Sejarawan/Budayawan. *Wawancara*. Takengon, 22 Maret 2013.